

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. **Linda Agustina, Dhini S., Nina Oktarina, dan Sandy A. (2015)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, multiple regresi, dan analisis jalur (*path analysis*).

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan 20 perusahaan perbankan yang digunakan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang didapat dari laporan tahunan perusahaan perbankan dengan metode dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dari pengujian yang dilakukan secara empiris menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan atas kinerja keuangan dan pengungkapan CSR, tetapi kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan CSR pengungkapan. Pada hubungan atas *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan, CRS tidak diposisikan sebagai variabel intervening.

2. Rika Oktaria, Rizal Effendi, dan Christina Yunita W. (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan ukuran perusahaan (sebagai variabel independen) terhadap kinerja keuangan perusahaan (variabel dependen). Variabel kinerja keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari perusahaan manufaktur di BEI. Sampel penelitian ditentukan dengan metode sampel jenuh.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) berupa laporan keuangan tahunan dan dari situs (www.iicg.org) berupa skor CGPI dari tahun 2009-2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan secara parsial *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, namun *Corporate Social Responsibility* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Soffia Pudji Estiasih, Hening Widi Oetomo, Nur Fadrijh Asyik, dan Akhmad Riduwan (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang pengaruh CSR dan GCG pada nilai perusahaan dengan karakteristik perusahaan sebagai variabel moderasi. Variabel yang digunakan dalam model penelitian ini dikelompokkan menjadi dua

kategori umum: Variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah perusahaan nilai perusahaan (NP) yang proksikan dengan Tobin's Q.

Variabel independen termasuk: (1) *Corporate Social Responsibility* (CSR) diproksikan oleh *Corporate Social Responsibility* Indeks dari tiap perusahaan, (2) *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan oleh (a) Kepemilikan Manajerial (KM) diperoleh dari persentase kepemilikan manajerial, (b) Kepemilikan Institusional (KI) adalah diperoleh dari persentase kepemilikan institusional, (c) Komisaris Independen (KIN) adalah diperoleh dari persentase Komisaris Independen, (d) audit komite (KA) adalah diperoleh dari jumlah anggota komite audit masing-masing perusahaan.

Variabel Moderasi pada penelitian ini adalah karakteristik perusahaan yang meliputi: (1) profitabilitas (Pr) adalah diperoleh dari laba atas ekuitas (ROE), (2) perusahaan ukuran (FS) adalah diperoleh dari penjualan Ln, (3) peluang pertumbuhan (GO) adalah diperoleh dari pendapatan harga (PER). Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear dan analisis regresi moderasi (MRA).

Berdasarkan analisis regresi moderasi (MRA), penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel lain tidak memiliki pengaruh signifikan atas nilai perusahaan. Profitabilitas memoderasi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, Komisaris Independen pada nilai perusahaan dan profitabilitas tidak memoderasi CSR dan Komite audit pada nilai perusahaan. Ukuran perusahaan memoderasi CSR, kepemilikan institusional dan

juga komite audit pada nilai perusahaan, namun ukuran perusahaan tidak moderasi kepemilikan manajerial dan Komisaris Independen pada nilai perusahaan. Peluang pertumbuhan tidak CSR, kepemilikan manajerial, kepemilikan kelembagaan, Komisaris Independen, moderat dan audit komite perusahaan nilai.

4. I Wayan Hendra Karjaya dan Eka Ardhani Sisdyani (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan pengungkapan *Good Corporate Governance* (variabel independen) pada kinerja keuangan (variabel dependen) perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Jumlah populasi perusahaan adalah 37 perusahaan, selanjutnya jumlah sampel adalah sebanyak 14 perusahaan pertambangan, yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*.

Jenis Data kuantitatif yang digunakan adalah annual report perusahaan pertambangan yang terkandung data mengenai nilai ROA, jumlah dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Data kualitatif yang digunakan adalah pengungkapan CSR yang terdapat dalam annual report. Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi non partisipan. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *CSR* berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan tiga proksi yang digunakan untuk *GCG* tidak semuanya menunjukkan pengaruh positif. Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, namun kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan

perusahaan. Pengungkapan *CSR* perlu dilakukan, guna mencegah biaya eksternal perusahaan yang berdampak pada kinerja keuangan. Selain itu, penerapan mekanisme *GCG* akan dapat membantu pula untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

5. Mukhtaruddin, Relasari, dan Messa Felmania (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh seperti mekanisme *Good Corporate Governance* (Dewan komisaris, Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit) dan pengungkapan *CSR* terhadap nilai perusahaan. Mekanisme *GCG* diprosikan melalui Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Kudit, dan pengungkapan *CSR* sebagai Variabel Independen sementara Nilai Perusahaan (Tobin's Q) sebagai Variabel Dependen.

Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa saham Indonesia 2010-2011, yang menerbitkan dan melaporkan kegiatan *CSR*. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 33 perusahaan yang dipilih oleh teknik *purposive sampel*. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit, dan pengungkapan *CSR* tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan, dan Dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

6. Ratna Desi Ariyani dan Juniati Gunawan (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kembali tentang pengaruh pengungkapan GCG dan CSR terhadap kinerja perusahaan yang masih kontradiktif dan bervariasi dengan memfokuskan terhadap sektor perbankan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan peserta yang sering mengikuti riset atau pemeringkatan penerapan GCG menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2005 – 2010. Selain itu sebagai variasi dari penelitian sebelumnya, sektor perbankan wajib melaporkan CSR menurut Pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Variabel independen yang digunakan adalah GCG yang diukur dengan menggunakan instrumen *Indeks Good Corporate Governance* (IGCG) dan CSR dengan menggunakan instrumen *Indeks Corporate Social Responsibility* (ICSR). Masing-masing variabel independen dihubungkan dengan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan perbankan yang diukur dengan menggunakan rasio ROA dan ROE untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan.

Ruang lingkup penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel pengungkapan GCG, pengungkapan CSR dan kinerja bagi perusahaan-perusahaan perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengamati laporan tahunan (*annual report*) tahun 2005 sampai tahun 2010.

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik *multiple regression model* (regresi berganda). Sampel 10 perusahaan perbankan dipilih dari populasi yang ada berdasarkan pertimbangan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dari tahun 2005 sampai 2010. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. GCG memiliki persentase pengungkapan GCG yang cenderung mengalami kenaikan Hal ini menunjukkan bahwa perbankan sebagai sektor yang sering mengikuti *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2005–2010 sudah menyadari arti pentingnya GCG dan CSR bagi keberlangsungan kinerja perusahaan perbankan. Persentase pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan bersifat fluktuatif dan belum menyadari kewajibannya untuk mengungkapkan CSR menurut Pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu terjadi ketidaksesuaian program CSR dengan bisnis inti perbankan.
2. Pada persamaan regresi berganda koefisien regresi variabel GCG terhadap ROA maupun ROE bernilai positif sehingga GCG mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan. Koefisien regresi variabel CSR terhadap ROE dan ROE juga menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti CSR juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan.

7. **Kartina Natalylova (2013)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara struktur *corporate governance* yang diproksikan sebagai kepemilikan public, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap *Corporate Social Responsibility* dan kinerja perusahaan serta *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini terdapat empat variabel yang akan di uji. Variabel independen terdiri dari Kepemilikan Publik, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, dan Komite Audit. *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel intervening, Kinerja perusahaan (Tobin's Q) sebagai variabel dependen. Jenis Industri (*High-Low-Profile*), Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai variabel kontrol.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang mendapatkan dari *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA) pada tahun 2009-2011. Sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan yang memperoleh *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2006-2011. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan uji *Statistic Regression Weight* dan *Square Multiple Correlations* dalam program AMOS 6.

Melalui pendekatan analisa jalur (*path analysis*) yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
2. *Good Corporate Governance* tidak mempunyai pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

3. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
4. Pengujian variabel kontrol, yaitu jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan untuk komite nominasi dan remunerasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

8. Sandhika Cipta Bidhari, Ubud Salim, dan Siti Aisjah (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efek keterbukaan informasi tanggung jawab sosial perusahaan pada kinerja keuangan dan nilai perusahaan dalam industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan positivisme. Sampel dari penelitian ini adalah 15 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria populasi dengan pengamatan periode 2008-2011.

Variabel independen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan (ROA, ROE, ROS) dan nilai perusahaan (Tobin's Q), variabel dependen pada penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* yang dinilai dari *Corporate Social Responsibility Indeks*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan informasi mempengaruhi pada semua pengukuran kinerja keuangan yaitu Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan kembali pada penjualan (ROS). Informasi pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur oleh Tobin's. Kinerja keuangan perusahaan yang diukur oleh ROA dan ROE mempengaruhi pada nilai yang diukur dengan Tobin's Q, tapi ROS tidak mempengaruhi pada nilai perusahaan yang diukur oleh Tobin's Q.

9. Wardoyo, Theodora Martina, dan Veronica (2013)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), yang diukur dari jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kinerja perusahaan (ROA dan ROE) terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan *go public* yang berjumlah 29 bank.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan pada penelitian ini, hanya 24 bank yang menjadi sampel dengan periode pengamatan 2008-2010. Variabel independen adalah GCG, CSR dan kinerja perusahaan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Analisis data yang digunakan terdiri dari analisis korelasi, determinasi, uji t, uji f, dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ROA dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

10. Destya Ramia Abriyani, Sudarso Kaderi W. dan Erman Sumirat (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di sektor telekomunikasi Indonesia dan untuk mengetahui tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Hal ini sering dilakukan ketika penduduk relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT XL Axiata Tbk (EXEL), PT Mobile-8 Telecom Tbk (FREN), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Indosat Tbk (ISAT), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X 2), Komisaris Independen (X 3), Dewan Komisaris (X 4), Ukuran Komite Audit (X 5), Ukuran Perusahaan (X 6), Profitabilitas (X 7), Leverage (X 8), Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan (Y).

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas, kemudian analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada hubungan *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan dengan pengungkapan sosial perusahaan dalam hipotesis sesuai secara bersamaan, sementara kepemilikan kelembagaan dan komite audit secara signifikan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

sebagian. Tahap berikutnya adalah menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan menemukan bahwa komite audit adalah variabel paling berpengaruh pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.



Tabel 2.1
Tabel Review Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Linda Agustina, Dhini S., Nina Oktarina, dan Sandy A.	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. 2. Menggunakan analisis deskriptif. 3. Menggunakan analisis regresi berganda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel intervening, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan variabel independen dan dependen. 2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan perbankan, sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan sampel dari perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i>.
2.	Rika Oktaria, Rizal Effendi, dan Christina Yunita W.	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. 2. Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda. 3. Menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan GCG dan CSR sebagai variabel independen. 2. Pada penelitian terdahulu penentuan sampel penelitian menggunakan metode sampel jenuh, sedangkan pada penelitian sekarang sampel ditentukan berdasarkan beberapa kriteria.
3.	Soffia Pudji Estiasih, Hening Widi Oetomo, Nur Fadrih Asyik, dan Akhmad Riduwan	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan GCG dan CSR sebagai variabel independen. 2. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel moderasi, sedangkan pada penelitian yang sekrang hanya menggunakan variabel independen dan dependen. 2. Penelitian terdahulu menggunakan nilai

				perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen,
4.	I Wayan Hendra Karjaya dan Eka Ardhani Sisdyani	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> untuk menentukan sampel. 2. Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder. 3. Menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan objek dari perusahaan pertambangan, sedangkan pada penelitian sekarang objek yang digunakan adalah perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i>. 2. Pada penelitian terdahulu periode dari objek yang digunakan adalah pada tahun 2008-2011, sedangkan pada penelitian yang sekarang periode objek adalah tahun 2011-2014.
5.	Mukhtaruddin, Relasari, dan Messa Felmania	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel independen yang terdiri dari GCG dan CSR. 2. Menggunakan analisis deskriptif untuk pengujian data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. 2. Penelitian terdahulu menggunakan objek sampel dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian sekarang objek yang digunakan hanya dari perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i>.
6.	Ratna Desi Ariyani dan Juniati Gunawan	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel independen yang terdiri dari GCG dan CSR. 2. Menggunakan kinerja keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan perbankan, sedangkan pada penelitian sekarang

			<p>perusahaan sebagai variabel dependen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> untuk menentukan sampel. 4. Menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 5. Menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. 	<p>sampel yang digunakan adalah perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada penelitian terdahulu periode dari objek yang digunakan adalah tahun 2005-2010, sedangkan pada penelitian yang sekarang periode objek adalah tahun 2012-2014.
7.	Kartina Natalylova	2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel independen yang terdiri dari GCG dan CSR. 2. Menggunakan teknik analisis regresi untuk menguji hipotesis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan CRS sebagai variabel intervening, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan variabel independen (CSR dan GCG) dan dependen (Kinerja Keuangan Perusahaan). 2. Penelitian terdahulu menggunakan Jenis Industri (<i>High-Low-Profile</i>), Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai variabel kontrol, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan variabel independen dan dependen. 3. Penelitian terdahulu menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan yang memperoleh <i>Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)</i> dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2011, sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang digunakan adalah perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i> yang tercatat di BEI.
8.	Sandhika Cipta Bidhari, Ubud Salim,	2013	1. Jenis data yang digunakan adalah berupa	1. Pada penelitian terdahulu berjuan untuk

	dan Siti Aisjah		<p>data sekunder.</p> <p>2. Menggunakan analisis deskriptif untuk pengujian data.</p>	<p>menganalisis dan menjelaskan efek, sedangkan pada penelian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh.</p> <p>2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel independen.</p> <p>3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen.</p> <p>4. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan perbankan, sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang digunakan adalah perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i>.</p>
9.	Wardoyo, Theodora Martina, dan Veronica	2013	<p>1. Menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.</p> <p>2. Menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis.</p>	<p>1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen.</p> <p>2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan GCG, CSR, dan kinerja keuangan</p>

				<p>perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan GCG dan CSR sebagai variabel independen.</p> <p>3. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari 24 perusahaan perbankan periode 2008-2011, sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang digunakan adalah perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i>.</p>
10.	Destya Ramia Abriyani, Sudarso Kaderi W. dan Erman Sumirat	2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. 2. Menggunakan GCG sebagai variabel independen. 3. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu penentuan sampel penelitian menggunakan metode sampel jenuh, sedangkan pada penelitian sekarang sampel ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. 2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan telekomunikasi di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang digunakan adalah perusahaan <i>Agriculture and Fishing</i>. 3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Sebuah perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan laporan atas kegiatan operasional yang telah dijalankan meliputi satu set laporan keuangan. Akan tetapi, perusahaan juga diijinkan untuk mengungkapkan laporan tambahan, yaitu laporan yang berisi lebih dari sekedar laporan keuangan, misalnya laporan tahunan tentang aktivitas *Corporate Social Responsibility* perusahaan ataupun laporan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi tambahan mengenai kegiatan perusahaan sekaligus sebagai sarana untuk memberikan tanda (*signal*) kepada para stakeholders mengenai hal-hal lain, misalnya memberikan tanda (*signal*) tentang kepedulian perusahaan terhadap wilayah sekitarnya, atau tanda bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan tetapi menyediakan informasi yang lebih bagi para stakeholders. Tanda-tanda (*signals*) ini diharapkan dapat diterima secara positif oleh pasar sehingga mampu mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang tercermin dalam harga pasar saham perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Priyatna dan Subekti (2013) menjelaskan bahwa teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Perusahaan seringkali dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan (*agent*) dan pemegang saham atau pemilik perusahaan (*principal*). Seorang manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas semua kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan perusahaan. Manajer akan melaporkan sesuatu yang cenderung mementingkan utilitasnya atau kepentingan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan pemegang saham.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik dalam perusahaan. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Priyatna dan Subekti (2013) *agency cost* meliputi tiga hal, yaitu :

1. *Monitoring Cost*

Merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang.

2. *Bonding Cost*

Merupakan kondisi dimana agen mungkin membelajakan sumber daya perusahaan dalam rangka menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang

dapat merugikan principal atau dengan tujuan meningkatkan keyakinan bahwa principal akan memberikan kompensasi atas tindakan tersebut.

3. *Residual Loss*

Merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami principal.

2.2.2 Teori Legitimasi

Menurut Haniffa dan Cooke (2005) dalam Priyatna dan Subekti (2013) menyatakan bahwa *legitimacy theory* merupakan perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan perusahaan berusaha menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari kelompok tersebut.

Salah satu hal yang menarik dalam teori ini adalah hal yang mendasari teori legitimasi tersebut. Menurut Ghazali, Imam dan Chariri (2007) dalam Tita (2012) mengungkapkan hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.

Shocker dan Sethi (1974) dalam Tita (2012) menjelaskan tentang konsep sosial adalah sebagai berikut :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan, beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhan didasarkan pertama pada hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan, kedua distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki.

Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan kinerja yang baik dari

masyarakat dan investor adalah dengan mengungkapkan pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan pengungkapan laporan tersebut, sebuah perusahaan akan mendapatkan pandangan dan pengakuan baik yang akan menarik investor dalam negeri maupun luar negeri.

2.2.3 Good Corporate Governance

Menurut Arifin (2009) dalam Priyatna, B.S. & Subekti, I. (2013) mengatakan bahwa tujuan *Good Corporate Governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu pilar dari sistem ekonomi pasar, karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Penerapan GCG mendorong persaingan yang sehat dan iklim yang kondusif, sehingga dengan begitu perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dengan biaya modal yang lebih rendah sehingga mempengaruhi performa bisnis yang ditandai dari harga saham perusahaan (Amri, 2011).

Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (www.worldbank.org). Disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika.

Definisi lain tentang *Good Corporate Governance* diungkap KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dalam sebuah artikel mendefinisikan bahwa (knkg-indonesia.com):

Good Corporate Governance merupakan upaya memotivasi manajemen untuk meningkatkan keberhasilan (*effectiveness*) dan sekaligus juga mengendalikan perilaku manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan *stakeholders*, dalam kerangka yang sudah disepakati bersama. Tentu saja kepentingan konsumen termasuk diantaranya.

Menurut Sutini dan Didin (2010) dalam Fitri (2013) menjelaskan Struktur *Good Corporate Governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Praktik mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki banyak perbedaan menurut setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, namun demikian pada dasarnya adalah mempunyai banyak kesamaan.

Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) adalah sebagai berikut (knkg-indonesia.com):

1. AKUNTABILITAS

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

2. PENGAWASAN

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

3. DAYA TANGGAP

Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

4. **PROFESIONALISME**
Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. **EFISIENSI & EFEKTIVITAS**
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. **TRANSPARANSI**
Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. **KESETARAAN**
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. **WAWASAN KE DEPAN**
Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. **PARTISIPASI**
Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. **PENEGAKAN HUKUM**
Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengukuran *Good Corporate Governance* digunakan untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas pengungkapan meliputi banyak hal yang didasari oleh sepuluh prinsip *Good Corporate Governance*. Pengukuran *Good Corporate Governance* pada penelitian ini diprosikan melalui empat komponen pengukuran. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh beberapa menjadi acuan dalam penelitian, yaitu Priyatna & Subekti (2013), Wardoyo dan Veronica (2013), Karjaya dan Sisdyani (2014), Mukhtaruddin, Relasi dan Felmania (2014)

yang juga menggunakan empat komponen pengukuran yaitu: Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit.

Sejalan dengan adanya mekanisme GCG ini diharapkan dapat menjadi alat *monitoring* terhadap manajer perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, jika perusahaan menerapkan sistem GCG diharapkan kinerja tersebut akan meningkat menjadi lebih baik, dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan.

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (*Board Of Commisaris*) berfungsi melakukan pengawasan, dan melakukan segala kemampuan terbaiknya hanya untuk kepentingan perusahaan. Menurut Rachmad (2012) dalam Karjaya dan Sisdyani (2014), Dewan Komisaris merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham.

Perusahaan yang sudah melakukan GCG diwajibkan untuk mempunyai dewan komisaris. Saat ini di dalam suatu perusahaan, diwajibkan mempunyai sekurang kurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Ujiyantho dan Pramuka (2007) dalam Natalylova (2013) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar berdasarkan penilaian menggunakan persentase ukuran dari dewan komisaris. Tidak sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan

penilaian berdasarkan daftar pertanyaan efektivitas dewan komisaris yang terdiri dari lima kategori penilaian yang digunakan Hermawan (2009).

2. Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga seringkali institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Menurut Pozen (1994) dalam Etty (2009), investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Investor Pasif
Tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial,
2. Investor Aktif
Ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial.

Keberadaan institusi ini mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan karena investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan oleh manajer. Mekanisme *monitoring* tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tita (2012) mengungkapkan bahwa :

Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan dan diharapkan juga perusahaan dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Berdasarkan hal tersebut berarti dengan jumlah kepemilikan yang signifikan, maka investor institusional akan dapat memonitor kinerja manajemen sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela untuk mendorong meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian terdahulu, penilaian kepemilikan institusional pada penelitian ini menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu elemen *Good Corporate Governance* (GCG) yang berpengaruh secara intensif bagi manajemen untuk melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham sebagai pemilik saham. Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Etty (2009) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah :

Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk

kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross *et al.*, 2002) dalam (Tita, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, penilaian kepemilikan manajerial dalam penelitian ini menggunakan persentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial.

4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi (Kep. 29/PM/2004). Pada umumnya tanggung jawab komite audit meliputi tiga bidang (KNKG, 2006), yaitu :

1. Laporan keuangan (*Financial Reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang;
2. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komi saris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Tugas Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa (KNKG, 2006) :

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,

3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Mukhtaruddin, Relasi dan Felmania (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa komite audit yang dinilai berdasarkan jumlah anggota komite audit pada perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian tersebut, komite audit pada penelitian Hermawan (2009) dinilai berdasarkan daftar pertanyaan efektivitas komite audit yang terdiri dari empat kategori.

2.2.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pihak luar. Selain informasi keuangan yang diwajibkan, perusahaan juga melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela, seperti pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan oleh Hackston & Milne (1996) yang dalam Priyatna dan Subekti (2013) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Diluar peran tradisional perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan kepada pihak internal perusahaan, perusahaan juga dituntut untuk memperluas tanggung jawab organisasinya. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Beasley, 1996).

Menurut Kotler & Nancy (2005) *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan semua kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan dan akibatnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar (Natalylova 2013).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Tita (2012), *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis usaha maupun pembangunan. Berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan karena suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas harus didasarkan keputusan yang tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan, melainkan juga berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagai berikut (bapepam.go.id) :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*).

2.2.5 Kinerja Perusahaan

Kinerja keuangan menurut (Anwar *et al.*, 2010) dalam Wardoyo dan Theodora (2013) adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Helfert (1996) dalam Lusiyati dan Salsiyah (2013) mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Evaluasi atau penilaian

terhadap kinerja perusahaan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang dilakukan perusahaan. Adanya penilaian kinerja terhadap perusahaan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai pun akan terlaksana dengan pengambilan keputusan yang tepat.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan pengukuran kinerja (*Performing Measurement*) menurut Mulyadi (2012:227) adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dibagi menjadi tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif (Hanafi, 2009 : 76), yaitu:

- a. Ukuran kriteria tunggal
Ukuran kriteria tunggal (*single criteria*) adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kelemahan apabila kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerja yaitu orang akan cenderung memusatkan usahanya pada kriteria pada usaha tersebut sehingga akibatnya kriteria lain diabaikan, yang kemungkinan memiliki arti yang sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan.
- b. Ukuran kriteria beragam
Ukuran kriteria beragam (*multiple criteria*) adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kriteria manajer. Kriteria ini mencari berbagai aspek kinerja manajer, sehingga manajer dapat diukur kinerjanya dari beragam kriteria. Tujuan penggunaan beragam ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja.
- c. Ukuran kriteria gabungan
Ukuran kriteria gabungan (*composite criteria*) adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran , untuk memperhitungkan bobot

masing-masing ukuran dan menghitung rataratanya sebagai ukuran yang menyeluruh kinerja manajer. Kriteria gabungan ini dilakukan karena perusahaan menyadari bahwa beberapa tujuan lebih penting dibandingkan dengan tujuan yang lain, sehingga beberapa perusahaan memberikan bobot angka tertentu pada beragam kriteria untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat menggunakan analisis laporan keuangan atau analisis rasio. Analisis rasio keuangan merupakan instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu.

2.2.6 Hubungan Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan

Wulandari (2006) dalam Natalylova (2013) mengemukakan bahwa Dewan Komisaris merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *Good Governance*. Dewan Komisaris merupakan proporsi anggota Dewan Komisaris yang ada di dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan jika semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka integritas pengawasan kepada dewan direksi akan semakin meningkat, sehingga akan berdampak juga terhadap meningkatnya kinerja dari perusahaan. Dewan komisaris yang berjumlah banyak juga berguna untuk mengatasi kemungkinan terjadi konflik agensi pada perusahaan, sehingga sebuah perusahaan hanya akan berfokus untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

2.2.7 Hubungan Kepemilikan Intitusional dengan Kinerja Perusahaan

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Pemegang saham institusional umumnya berbentuk seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa, dan institusi lain. Investor institusional merupakan pamegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Tingkat kepemilikan tersebut menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Pada beberapa situasi yang berbeda, kepemilikan institusional (*institution alownersip*) memiliki keterkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang lebih sebagai variabel substitusi selain dividen, maupun hutang dalam mengontrol konflik keagenan (*agency conflict*) (Crutchley *et al.*, 1999). Moh'd et al. (1998) juga menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional akan mengurangi biaya agensi. Keberadaan pemegang saham institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan karakteristik pasar modal Indonesia sebagai *emerging market*, kepemilikan institusional (*institutional ownership*) mempunyai peranan dalam melakukan monitoring untuk mereduksi adanya konflik keagenan. Kepemilikan institusional, secara umum dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya

kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

2.2.8 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Kinerja Perusahaan

Konflik keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha memaksimalkan utilitas masing-masing (Priyatna dan Subekti, 2013). Manajer yang memiliki saham perusahaan berarti manajer tersebut sekaligus adalah pemegang saham. Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer disebut kepemilikan manajerial. Manajer yang memiliki saham perusahaan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Kinerja keuangan dan nilai perusahaan akan diperkuat oleh kepemilikan manajerial karena semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri (Gray et.al,1998)

Menurut Demsetz (1983), Fama dan Jansen (1983), menunjukkan bahwa dalam tahap tertentu, tingkat kepemilikan manajerial tidak selalu berhubungan linier positif terhadap nilai perusahaan. Demsetz (1983), Fama dan Jansen (1983), juga mengatakan dalam kepemilikan *insider* yang relatif rendah, efektifitas *control* dan kemampuan menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajer akan berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun pada kepemilikan *insider* yang tinggi, mekanisme tersebut akan berkurang efektifitasnya. Kondisi ini memunculkan *Management Entrenchment*, yang menyatakan kepemilikan

insider yang tinggi akan berdampak pada kecenderungan manajer untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, dikarenakan hak *voting* dan *bargaining power* yang semakin tinggi yang dimiliki oleh *insider* dalam penentuan kebijakan sehingga mengakibatkan pemilik tidak mampu menjalankan mekanisme *control* dengan baik, hal ini akan menyebabkan turunnya nilai perusahaan karena tidak terjadi ketidaksamaan kepentingan antara manajer dan pemilik yaitu pemegang saham minoritas.

Kepemilikan oleh manajer dipandang dapat menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajer, sehingga diharapkan dengan peningkatan kepemilikan saham oleh manajer, manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para prinsipal, karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja.

2.2.9 Hubungan Komite Audit dengan Kinerja Perusahaan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut KNKG (2006), salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Jumlah anggota yang besar dalam komite audit bukan merupakan jaminan bahwa kinerja suatu perusahaan akan membaik, sehingga investor menganggap keberadaan komite audit bukanlah faktor yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengapresiasi kinerja perusahaan.

Keberadaan komite audit dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan pada peraturan yang ditetapkan pemerintah sehingga dalam

pelaksanannya, komite audit belum melakukan kewajibannya secara maksimal. Adaanya komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit.

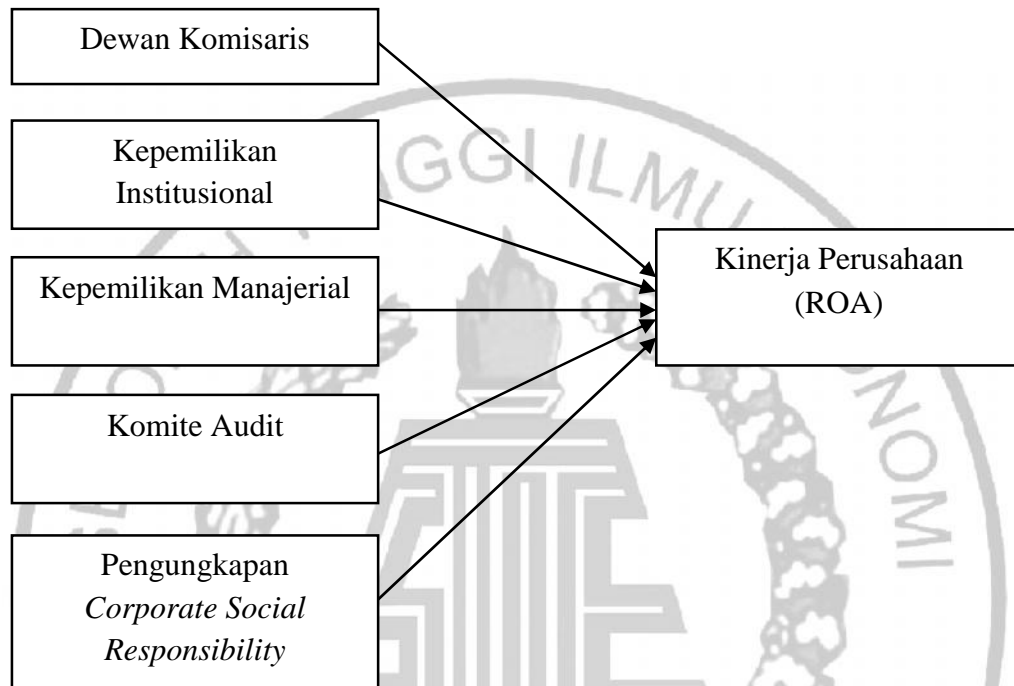
Keanggotaan komite audit yang diatur oleh Bapepam dan Bursa Efek Indonesia, disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota lain berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Penerapan jumlah keberadaan komite audit yang memenuhi standar akan meningkatkan kinerja maupun nilai perusahaan. Kehadiran komite audit membantu dewan komisaris untuk mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, komite audit diharapkan memiliki komitmen waktu yang tinggi. Komite audit diharapkan memiliki banyak waktu untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat berkurang. Berdasarkan hal tersebut, maka efektivitas peranan komite audit dapat dilihat dari empat karakteristik yaitu independensi komite audit, aktivitas komite audit (rapat), ukuran (size) dari komite audit, dan komposisi dari komite audit.

2.2.10 Hubungan Corporate Social Responsibility dengan Kinerja Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian dari strategi bisnis untuk menunjang keberlangsungan hidup perusahaan dimasa mendatang. *Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai masalah sosial dan lingkungan jika perusahaan ingin memaksimalkan hasil kinerja keuangan jangka panjang yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Matthew Brine, 2008). Pengungkapan item CSR yang terdapat dalam laporan keuangan diharapkan akan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan para investor, bahwa perusahaan tersebut akan terus berkembang dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini akan berdampak positif terhadap perusahaan, selain membangun *image* yang baik di mata para *stakeholder* karena kepedulian perusahaan terhadap sosial lingkungan, juga akan menaikkan laba perusahaan melalui peningkatan penjualan. Pengungkapan CSR dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat, dan kemudian tujuan akhir dari pengungkapan CSR adalah untuk menunjang tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan profit maksimum.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 memperlihatkan gambaran tentang variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan kerangka teoritis diatas maka kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang didapat ROA.